

**STUDI IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
DALAM MEMILIH BUPATI PADA MASYARAKAT  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Universitas Medan Area  
Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Dalam Meraih Gelar Sarjana**



**O l e h**

**SHAFRON  
NIM: 12 860 0434**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT sebagai wujud syukur penulis kepadaNya atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini sebagai syarat akhir untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis merasakan dan menyadari sepenuhnya banyaknya dukungan dari berbagai pihak, yang oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Abdul Munir. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
2. Ibu Hj. Cut Meutia. S.Psi. M.Psi, selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Beliau dengan sabar dan teliti untuk memonitor perjalanan karya tulis ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Ibu Farida Hanum. S.Psi. M.Psi, selaku dosen pembimbing II skripsi, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Wakil Bupati Mandailing Natal, yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi peneliti mengadakan penelitian.
5. Adinda M. Iqbal. S.Psi, yang telah memberikan bantuan dalam menjalankan penelitian pada masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.
6. Seluruh keluargaku tercinta, teristimewa untuk istri dan anak-anakku, yang merupakan motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang pantas dari Allah SWT dan semoga karya ini bermanfaat. Amin.

Medan, September 2013

Peneliti





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
 <b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
1. Kabupaten Mandailing Natal .....	15
2. Bupati .....	16
B. Pengambilan Keputusan .....	18
1. Pengertian Pengambilan Keputusan.....	18
2. Proses Pengambilan Keputusan .....	20

C. Gaya Pengambilan Keputusan .....	22
1. Pengertian gaya Pengambilan Keputusan .....	22
2. Gaya Pengambilan Keputusan Rasional .....	24
3. Gaya Pengambilan Keputusan Intuitif .....	25
D. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan .....	28
E. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	35
B. Identifikasi Variabel Penelitian .....	35
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur .....	40
G. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV. PELAKSANAAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Orientasi Kanchah dan Persiapan Penelitian .....	43
B. Pelaksanaan Penelitian .....	48
C. Analisis Data dan Hasil Penelitian .....	49
D. Pembahasan .....	72
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan sebuah bentuk demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilu adalah mekanisme politik untuk melakukan pergantian administrasi pemerintahan. Melalui pemilu, dipilih anggota parlemen dan pemimpin pemerintahan yang baru. Begitu juga halnya dengan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang dilakukan di semua daerah di Indonesia. Pemilu meski merupakan peristiwa politik, juga mengandung dimensi ekonomi (<http://regional.kompas.com/read/2012/10/15/21490550/Indeks.Demokrasi.Indonesia.Belum.Baik>).

Apa pertimbangan utama rakyat saat memilih partai politik dan pemimpin pemerintahan baru? Hal penting yang lazim dijadikan pertimbangan adalah kemampuan pemimpin menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi. Bagi *incumbent*, bila selama memerintah memiliki kinerja bagus dalam mengelola perekonomian, terbuka peluang dipilih kembali. Bagi para calon pemimpin, bila rakyat menganggap dia mampu mengurus ekonomi, sangat mungkin dapat mengalahkan *incumbent* dan mengambil alih administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, maka kinerja ekonomi merupakan barometer utama tingkat *elektabilitas* tokoh politik untuk dipilih dalam pemilu maupun pemilukada. Bagi pemilih, ini merupakan pertimbangan rasional yang lazim disebut *the rational choice explanations of economic voting*. Karena itu kecanggihan merumuskan kebijakan

ekonomi menjadi faktor determinan tinggi rendahnya probabilitas calon pemimpin dipilih rakyat (<http://regional.kompas.com/read/2012/10/15/21490550/Indeks.Demokrasi.Indonesia.Belum.Baik>).

Sejak terjadinya reformasi pada Tanggal 20 Mei 1998, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami perubahan pada sendi-sendi politik yang mendasar, yang awalnya bersifat otoriter, tidak bebas berpendapat dan terkungkung menjadi sangat terbuka dan sangat demokratis. Hal ini terlihat pada pemilu tahun 1999. Gelombang ini mencerminkan secara nasional bahwa pilihan yang kuat untuk memilih demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan, meskipun pada realitanya, hasil dari pilihan demokrasi tersebut sebagai sistem politik dan pemerintahan, tetapi proses demokrasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan hak-hak politik rakyat (Pradjasto, dkk. 2011).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik memberikan gambaran yang terang mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Indeks rerata Propinsi dalam IDI 2010 adalah 63,17 (skala 0-100) angka ini merupakan angka komposit dari ketiga aspek IDI 2010; kebebasan sipil (82,53), kelembagaan demokrasi (63,11) dan hak-hak politik (47,88). Angka ini menunjukkan kebebasan sipil sudah tergolong “baik”, diikuti kelembagaan demokrasi masuk kategori “sedang”, sementara pemenuhan hak-hak politik tergolong “buruk” (Kompas 24/10/2012).

Sesuai dengan data di atas, kebebasan sipil (82,53%) yang salah satunya kebebasan dalam memilih pemimpin yang diberikan sepenuhnya oleh Undang-Undang kepada setiap individu sebagai wujud demokrasi dengan tujuan untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terciptanya ruang kebebasan sipil serta gairah yang besar dalam memilih pemimpinnya ternyata belum menghasilkan hak-hak politik yang sesungguhnya. Secara kasat mata terlihat bahwa ada sesuatu yang paradoks antara rakyat yang memperoleh kebebasan dalam memilih pemimpinnya dengan hak-hak politik yang diperoleh rakyat setelah pemilihan itu terlaksana dan pemimpin telah terpilih.

Dalam konteks Indonesia, rasionalitas ekonomi pemilu tampaknya tidak berlaku, bahkan kaitan antara kinerja ekonomi dan tingkat elektabilitas partai atau calon pemimpin cenderung tidak sejalan. Menurut berbagai survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami penurunan, dari 80% (Nopember 2004) menjadi 54% (Mei 2008). Bahkan menurut survey Indo Barometer (Juli 2008) setelah kebijakan menaikkan harga BBM, popularitas SBY turun drastis sampai titik terendah, 30%. Ini menjadi indikasi, derajat kepuasan publik menurun. Padahal tingkat elektabilitas SBY dalam Pemilihan Presiden 2009 justru paling tinggi, 35,5% dibandingkan calon presiden lain, seperti Megawati 28%, Wiranto 7,0% dan Amien Rais 6,5% (Laporan Survey LSI dalam Kompas 23 Oktober 2008).

Hal ini merupakan fenomena aneh, suatu anomali perilaku pemilih yang sulit dijelaskan secara teoritis. Ada kesenjangan antara kesadaran kognitif, berbentuk kemampuan menilai bahwa pemerintahan SBY gagal memenuhi janji kampanye untuk membuat rakyat sejahtera dan preferensi politik untuk memilih pemimpin pemerintah yang mengunggulkan SBY. Anomali ini dikonfirmasi jajak pendapat Kompas 9 September 2008. Pemilih mengabaikan janji kampanye, lebih

mendasarkan pilihan kepada citra tokoh/elite pemimpin dan kelembagaan partai. Di pihak lain belum muncul pemimpin alternatif yang meyakinkan publik sehingga tersedia pilihan calon presdiden selain SBY.

Permasalahan kekecewaan publik ini tidak hanya ditujukan terhadap pucuk pimpinan pemerintah, namun berlaku juga terhadap kepala-kepala daerah di berbagai daerah di tanah air. Misalnya di Kabupaten Mandailing Natal.

Sejalan dengan proses demokrasi, melalui pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam hal ini di Kabupaten Mandailing Natal, telah dilakukan secara langsung pada tahun 2005. H. Amru Daulay SH kembali terpilih untuk memimpin pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal untuk periode yang kedua sampai dengan tahun 2010.

Proses demokrasi yang terus tumbuh dan berlanjut dengan berakhirnya kepemimpinan H. Amru Daulay SH pada tahun 2010 yang merupakan pilihan rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang, hak-hak individu untuk memilih pemimpinnya kembali dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung periode 2010-2015.

Pada saat itu, sekitar bulan Mei 2010 dilakukan pemilihan Kepala Daerah (Bupati) dimana masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dihadapkan pada tujuh pasangan calon Kepala Daerah yang akan dipilih. Dalam proses pemilihan tersebut secara mayoritas terpilih H.M. Hidayat Batubara, SE sebagai pemenang. Namun kemenangan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai keputusan No: Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal,06 Juli 2010. Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan tersebut karena dalam proses

pemilihan terbukti telah terjadi pelanggaran terstruktur praktik politik uang (*money politic*) secara sistematis dan *massive* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh setiap individu secara mayoritas untuk memilih kemenangan tersebut yang terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.

Mahkamah Konstitusi menyatakan batal atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 Tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 Tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal. Dalam proses pemungutan suara ulang pilihan masyarakat Kab. Mandailing Natal secara mayoritas masih tetap H.M. Hidayat Batubara, SE sebagai Bupati terpilih (Kompas 24/10/2012).

Terkait dengan Pemilukada di daerah Mandailing Natal, masyarakat dalam memilih pemimpin tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam memilih pemimpinnya. Setelah beberapa kali dilakukan Pemilukada, secara empiris terlihat bahwa ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh dalam proses memilih Kepala Daerah (Bupati), faktor-faktor yang teramati tersebut seperti; tim sukses yang erat kaitannya dengan publikasi kandidat, partai politik pendukung calon tersebut, materi yang

tergolong dalam logistik, dan hal-hal yang berkaitan dalam diri calon tersebut seperti kondisi fisik, pendidikan, kepribadian, pengalaman dan lain sebagainya (Kompas 24/10/2012).

Anderson (1984) mengutip *bloger* Maulana (2009), mengatakan bahwa terdapat lima kategori yang dapat dijadikan kriteria dalam menunjukan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, yaitu *Political Values*, *Organization Values*, *Personal Values*, *Policy Values*, dan *Ideological Values*.

*Political Values* (nilai-nilai politik). Dalam konteks ini keputusan diambil berdasarkan pada perhitungan keuntungan politis dimana kebijakan dipandang sebagai alat yang menguntungkan atau alat untuk mencapai tujuan kelompok kepentingannya. Melalui pandangan political behavior (kelakuan politis) keputusan yang dibuat akan diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan bagi, misalnya: organisasi buruh, aliansi petani, kelompok pergerakan pemuda, atau partai politik.

*Organization Values* (nilai-nilai organisasional). Pembuatan keputusan, khususnya birokrat, dapat juga dipegaruhi oleh nilai organisasional. Organisasi, seperti pemerintah, menggunakan banyak mekanisme *stick and carrot* dalam upaya untuk membujuk pegawainya agar dapat menerima dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan organisasi. Selanjutnya, keputusan individu diarahkan melalui pertimbangan seperti keinginan untuk organisasinya tetap hidup, untuk meningkatkan atau memperluas program dan aktivitasnya, atau untuk menjaga kekuasaan serta hak-hak istimewanya. Contoh: pegawai negeri sipil (PNS), Dharma wanita, himpunan suku tertentu, dan sebagainya.

*Personal Values* (nilai-nilai pribadi). Seperti diketahui, tidak ada manusia yang identik (sama persis) dengan manusia lainnya, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam konteks ini maka personal values menjadi logika berfikir yang juga perlu diperhatikan dalam memahami pengambilan keputusan. Misalnya, urgensi untuk melindungi atau mempromosikan keadaan fisik atau keuangan seseorang yang baik, reputasi, atau posisi historis seseorang dapat dijadikan sebagai kriteria keputusan. Seperti memilih seorang calon legislatif karena pertimbangan akan diberikan uang terima kasih atau memilih untuk tidak memilih (golput) karena ingin dianggap idealis.

*Policy Values* (nilai-nilai kebijakan publik). Pembuatan keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas. Sekelompok mahasiswa menyuarakan sebuah perubahan atau penentangan terhadap sebuah kebijakan karena mereka percaya tindakannya secara moral benar meskipun dapat membawa resiko pada mereka.

*Ideological Values* (nilai-nilai ideologis). Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran sederhana mengenai dunia dan cara bertindak sebagai petunjuk bagi seseorang untuk berperilaku. Di banyak negara berkembang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, nasionalisme, merupakan nilai-nilai ideologis yang menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan dalam dan luar negeri. Misalnya seseorang memilih partai karena partai tersebut memperjuangkan syari'at Islam atau peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina.



Dalam kaitannya dengan pilihan, manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki variasi dalam keanekaragaman pilihan-pilihan yang dihadapi. Aktivitas atau kegiatan seseorang pada dasarnya adalah tindakan untuk menentukan salah satu atau sejumlah pilihan dari beberapa alternatif yang dihadapinya (Barlett, 1980). Individu dihadapkan dengan beberapa alternatif untuk dipilah-pilah atau dikaji dan mulai menentukan alternatif mana yang sesuai atau mendatangkan manfaat bagi dirinya. Hal ini merupakan sebagian dari pokok pikiran yang disampaikan dalam *the real life choice theory* (Gladwin, 1980).

Menurut Gladwin (1980), apabila seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu berarti ia telah melewati suatu tahapan pemilihan dari beberapa alternatif yang ada di hadapannya. Jadi, apabila seseorang pergi berbelanja ke suatu supermarket, maka ia telah melewati tahap pemilihan terhadap beberapa alternatif. Kemungkinan sebelum pergi berbelanja ke supermarket, ia juga menghadapi pilihan lain, misalnya pergi ke salon, menjenguk cucu, menonton telenovela, menelepon seseorang, membaca koran, atau bersantai di atas sofa. Dari beberapa alternatif tersebut ia memilih untuk pergi berbelanja ke supermarket. Hal ini dipilih karena dipandang lebih sesuai dan mendatangkan manfaat bagi dirinya saat itu. Sangat dimungkinkan pilihan yang diambil oleh orang tersebut merupakan pilihan yang tidak sesuai dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Kemungkinan orang lain tersebut akan memilih beristirahat di atas sofa atau menonton televovela. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pilihan yang diambil oleh seseorang terkait dengan kondisi internal seseorang.

Erat terkait dengan pembahasan di atas adalah masalah pengambilan keputusan atau *decision making*. Pengambilan keputusan merupakan aktivitas

sehari-hari yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang baik disadari maupun tidak disadari. Pada saat orang harus memilih, mempertimbangkan, menaksir dan memprediksi sesuatu maka berarti ia berada dalam situasi pengambilan keputusan (Matlin, 1998).

Studi tentang pengambilan keputusan telah banyak dilakukan orang dari pelbagai disiplin ilmu. *Decision making* telah menjadi perhatian yang cukup lama baik dalam pengembangan teori ataupun penelitian dalam Psikologi sosial. Dalam kancan Psikologi, biasanya studi tentang pengambilan keputusan dikaitkan dengan pengaruh persepsi, ingatan, pola pikir, emosi dan karakteristik kepribadian (Wolman, 1997).

Menurut Chang (dalam Kuntadi, 1996), dalam kehidupan sehari-hari individu sering berada dalam situasi pengambilan keputusan yang ditandai dengan adanya permasalahan dan beberapa alternatif atau pilihan yang harus diambilnya. Pilihan-pilihan tersebut merupakan alternatif pemecahan masalahnya. Dalam menentukan pilihan yang diambil maka individu harus melakukan perhitungan, analisa dan perkiraan terhadap serangkaian alternatif tersebut. Alternatif yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian akan diambil, sementara alternatif yang merugikan akan dihindari atau diabaikan.

Proses pemilihan atau penentuan alternatif pemecahan masalah terhadap beberapa alternatif yang ada merupakan inti dari proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini meliputi semua aspek kegiatan individu, baik dalam kegiatan rutinitas maupun permasalahan yang penting dalam diri individu, namun seringkali dalam kajian ilmiah tentang pengambilan keputusan perhatian terutama ditujukan pada proses pengambilan keputusan yang penting dalam

kehidupan seseorang (dalam Siagian, 1991).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Dalam hal pengambilan keputusan ternyata ditemukan bahwa tidak semua individu melakukan pendekatan dengan cara yang sama. Jadi ada gaya yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan (Birgham Young University, 1999). Gaya pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai cara unik seseorang dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Tanpa memperhatikan keputusan apa yang dibuat, tiap orang mempunyai cara unik untuk mengambil keputusan. Tidak ada satupun cara terbaik yang dapat berlaku bagi semua orang. Setiap orang belajar mengandalkan suatu cara terbaik yang berlaku atas dirinya sesuai dengan pengalamannya (Harren dkk, dalam Bruce & Scott, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, maka berarti tiap orang memiliki cara atau gaya tersendiri dalam mengambil keputusan. Gaya pengambilan keputusan menjadi bersifat unik dan khas bagi individu-individu. Harren (dalam Bruce & Scott, 1999) mengajukan skema klasifikasi gaya pengambilan keputusan yang mencakup dua (2) kategori yang sangat berseberangan berkenaan dengan mengumpulkan informasi dan evaluasi informasi, yaitu gaya pengambilan keputusan rasional dan intuitif. Gaya pengambilan keputusan rasional bercirikan kepastian, kemampuan yang tinggi dalam perencanaan, sistematis, kepercayaan diri tinggi, cenderung menyelesaikan tugas dengan kontrol tinggi. Gaya intuitif lebih mengandalkan fantasi, perasaan, kesadaran emosional, kadang-kadang impulsif, cepat mengambil keputusan, banyak dipengaruhi oleh dorongan emosional.

Gaya pengambilan keputusan juga dapat dipahami sebagai cara respon yang dipelajari atau dibiasakan dan melalui hal ini, individu melakukan

pendekatan dan mengambil keputusan (Bruce & Scott, 1999). Dari hal ini nampak bahwa gaya pengambilan keputusan terjadi melalui pengalaman-pengalaman dan dalam kurun waktu tertentu atau dibiasakan.

Telah disebutkan di atas bahwa pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seseorang (Wolman, 1977). Tiap individu memiliki cara unik dalam melakukan pendekatan dan mengambil keputusan, sehingga cara-cara unik tersebut menjadi gaya pengambilan keputusan bagi masing-masing individu.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan, masalah pemilihan Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia juga menarik untuk dibahas. Mulai Daerah tingkat I, tingkat II, sarat dengan masalah yang pada umumnya mengundang keributan, bahkan kontak fisik cenderung tidak dapat dihindarkan. Permasalahan muncul disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah kecurangan Panitia Pemilu di berbagai tingkat menurut versi pendukung kandidat atau lawan partai politik. Permasalahan lain yang seringkali muncul adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin terpilih. Masalah yang terakhir ini, menarik untuk dikaji, sebab kekecewaan yang terlalu besar akan berdampak sangat buruk bagi kondisi stabilitas keamanan negara atau daerah. Pemimpin tidak menepati janji yang telah mereka ikrarkan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tertipu.

Fenomena yang terjadi ke Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan data yang peneliti dapatkan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Bupati. Rasa kecewa masyarakat terhadap Bupati termanifestasi melalui beberapa kali unjuk rasa yang melibatkan dan menarik perhatian banyak pihak. Unjuk rasa ini

dilakukan sebagai bentuk protes atas kepemimpinan Bupati yang dinilai tidak sesuai janji. Janji yang muluk-muluk sering disampaikan oleh calon pemimpin di suatu daerah ini sangat sering terjadi, khususnya pada masa kampanye, bahkan sebelum masa kampanye berlangsung. Berbagai upaya dilakukan oleh calon Kepala Daerah agar masyarakat pemilih menjatuhkan pilihan kepada dirinya, tanpa memandang apakah janji calon Kepala Daerah tersebut realistis atau tidak, yang pasti calon Kepala Daerah ingin memikat hati masyarakat.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul: Studi Identifikasi faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Bupati Pada Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah pemilihan Kepala Daerah (Bupati) adalah suatu masalah yang sangat penting untuk dibahas, mengingat kesalahan dalam memilih Kepala Daerah akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam memilih Kepala Daerah, setiap masyarakat memiliki pandangan dan cara tersendiri, dengan harapan semoga pemimpin yang mereka pilih dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan hak politik masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu ditinjau beberapa faktor yang berperan dalam mengambil sebuah keputusan untuk memilih pemimpin.

Fenomena yang sering terlihat di suatu daerah, Mandailing Natal misalnya, banyak ditemukan di masyarakat kekecewaan mereka terhadap Kepala Daerah, meskipun Kepala Daerah yang terpilih merupakan pilihan masyarakat. Hal ini

mengindikasikan bahwa mereka salah memilih atau Kepala Daerah yang tidak konsekuen atau tidak menepati janji sesuai dengan program kampanye terdahulu.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini menekankan pada pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin Kepala Daerah (Bupati) yang dipengaruhi oleh faktor *political values*, *organization values*, *personal values*, *policy values*, dan *ideological values*.

Sebagai subjek dalam penelitian ini (populasi) adalah masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Mandailing Natal, terdapat lebih kurang 330.000 jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang sangat mendasar untuk ditelaah dan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor apa yang dominan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih Bupati pada masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih Bupati pada masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu psikologi baik secara teoritis maupun praktis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

## 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi wahana perkembangan Ilmu Psikologi, khususnya di bidang Psikologi Industri dan Organisasi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin dan diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan serta memberikan informasi kepada peneliti lain untuk menindaklanjuti atau mengembangkan pada penelitian sejenis berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi pengurus partai maupun elemen pemerintahan lainnya dan juga masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk memilih Bupati.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

##### 1. Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 00 10''-10 50'' Lintang Utara dan 980 50'' sampai 1000 10'' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 2,145 DPL. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ±6.620,70 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Barat, Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat, Sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Mandailing Natal, memiliki 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan data yang terbaru dari BPS Kabupaten Mandailing Natal adalah jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20% dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80%; Muslim 379.064 jiwa, Non Muslim 11.325 jiwa. suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00%, etnis Melayu pesisir 7,00% dan etnis jawa 6,00% dengan jumlah total yang berhak memilih pemimpin ± 303.000 Jiwa di 960 Tempat Pemungutan Suara.

Kabupaten Mandailing Natal resmi terbentuk pada tanggal 23 Nopember 1998 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing

Natal dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada tanggal 9

Maret 1999 di Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan dan pejabat Bupati Mandailing Natal pada masa itu adalah H. Amru Daulay, SH berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100/253.TU/1999. Sedangkan peresmian gedung sementara kantor pemerintahan Mandailing Natal di Panyabungan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Alm. Tengku Rizal Nurdin pada tanggal 11 Maret 1999, di kompleks bekas perkantoran Proyek Pembangunan Irigasi Batang Gadis di daerah Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan yang kemudian dioperasikan sebagai kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang lebih dikenal dengan kompleks perkantoran Bupati lama.

Istilah Mandailing Natal sendiri pada mulanya sudah dikenal sejak tahun 1365 berdasarkan karya sejarah *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Kemudian setelah Kabupaten Mandailing Natal resmi terbentuk, istilah tersebut disosialisasikan bahwa akronim nama Kabupaten Mandailing Natal adalah Kabupaten Madina yang Madani.

## 2. Bupati

Istilah "bupati" berasal dari bahasa Jawa, yang sendirinya berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Telaga Batu, yang ditemukan di kampung tersebut dekat Palembang dan berisi pemujaan terhadap raja Sriwijaya, terdapat kata *bhupati*. Prasasti tersebut diperkirakan dari akhir abad ke-7 Masehi. Pakar prasasti Indonesia J. G. de Casparis menterjemahkan *bhupati* dengan istilah "kepala" (*hoofd* dalam bahasa Belanda). Kata *bhupati* juga ditemukan dalam prasasti Ligor, yang ditemukan di propinsi Nakhon Si Thammarat di Muangthai. Di abad ke-17, orang Eropa menyebut daerah tersebut dengan nama "Ligor".



Prasasti ini mengandung tanggal 775 Masehi. Istilah *bhupati* digunakan untuk menyebut raja Sriwijaya.

Dalam bukunya *Océanie ou cinquième partie du monde : revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées* ("Oceania atau bagian dunia yang kelima : majalah geografi dan etnografi tentang Malaysia, Mikronesia, Polynesia dan Melanesia, dan klasifikasi dan divisi baru untuk kawasan tersebut"), penjelajah asal Prancis Gérard Louis Domeny de Rienzi (1834) mencatat istilah "bupati".

Jabatan bupati dalam arti modern berasal dari masa awal kerajaan Mataram, pada masa Sultan Agung (bertahta 1613-45) menitip pengurusan daerah yang ditaklukkannya kepada orang yang dipercayainya. Saat itu nama pejabat tersebut adalah "adipati". Di masa Hindia Belanda, para *adipati* disebut *regent*. Biasanya mereka dipilih dari kalangan priyayi.

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa

Hindia Belanda, bupati disebut sebagai *regent*, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan *regent* seluruh wilayah Indonesia.

## B. Pengambilan Keputusan

### 1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan telah menjadi perhatian yang cukup luas baik dalam pengembangan teori atau penelitian dalam Psikologi sosial (Wolman, 1977). Bagi penelitian sosial, pengambilan keputusan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kelompok menjadi daerah penelitian yang penting (Hofstede, 1971). Hal ini memang terbukti dengan adanya studi-studi tentang pengambilan keputusan yang sudah banyak dilakukan oleh orang dari pelbagai latar belakang disiplin ilmu. Dalam bidang Psikologi biasanya studi pengambilan keputusan ini banyak dikaitkan dengan pengaruh persepsi, ingatan, pola berpikir, proses kognisi, emosi dan variabel-variabel kepribadian seseorang terhadap keputusan yang diambilnya (Suharman, 1999).

Menurut Mckeachie (1986), pengambilan keputusan adalah pertimbangan beberapa tujuan dan pengukuran atas kemungkinan keberhasilan dari beberapa alternatif yang diketahui. William Biddle (dalam Hofstede, 1971) menyatakan bahwa pengambilan keputusan sebagai *selection of proposed action to solve the problem*, yaitu suatu pilihan dari tindakan yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan. Hal yang senada dengan pernyataan tersebut, yaitu pengambilan keputusan diartikan sebagai pembuatan pilihan atas dua atau lebih alternatif yang ada. Pengambilan keputusan ini terjadi sebagai reaksi terhadap suatu masalah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Ada kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan, dan hal ini menuntut pertimbangan arah tindakan yang dipilih (Robbins, 1996).

Seseorang yang telah mengambil keputusan, dengan demikian dapat diartikan ia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan kepadanya. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kemungkinan atau pilihan yang tersedia bagi tindakan itu dibatasi oleh kondisi dan kemampuan orang-perorangan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik dan aspek psikologis (Roepke, 1982).

Siahaan (1992) memberikan batasan pengambilan keputusan sebagai pemilihan terhadap obyek perilaku tertentu dari dua alternatif atau lebih. Batasan yang lain menyatakan bahwa pengambilan keputusan diartikan sebagai proses berpikir dan bertindak yang diwujudkan dalam bentuk perilaku tertentu (Dunette, 1976). Definisi yang diberikan oleh Dunette ini nampak lebih menekankan adanya keterkaitan antara proses berpikir seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Chang (1972) menyatakan hal yang hampir sama dengan batasan di atas, yaitu bahwa pengambilan keputusan tidak hanya meliputi proses kognisi dan afeksi saja, melainkan juga meliputi perilaku seseorang. Pengambilan keputusan yang diambil oleh seseorang akan mengontrol tindakannya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan perilaku seseorang merupakan produk dari keputusan yang diambil. Simatupang (1986) mengatakan pada saat seseorang sedang melakukan analisa, mempertimbangkan serta melibatkan emosinya maka orang lain tidak bisa melihatnya, sedangkan pada saat ia melakukan suatu perilaku tertentu sebagai hasil dari keputusan yang diambilnya maka orang lain baru bisa melihatnya. Jadi

memahami pengambilan keputusan yang telah diambil seseorang seharusnya melihat dari sisi yang “bisa dilihat” dan dari sisi yang “tidak bisa dilihat”.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa pengambilan keputusan itu berkaitan dengan alternatif yang dihadapi individu (terutama pemecahan masalah) dan pilihan yang diambil individu terhadap alternatif yang ada. Setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda, hal ini mempengaruhi atau ikut menentukan pilihan yang ada pada individu.

## 2. Proses Pengambilan Keputusan

Memilih dan mengambil keputusan merupakan dua tindakan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam sepanjang hidupnya manusia selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan pengambilan keputusan (Simatupang, 1986). Hal ini sejalan dengan teori *real life choice*, yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan atau membuat pilihan-pilihan di antara sejumlah alternatif. Pilihan-pilihan tersebut biasanya berkaitan dengan alternatif dalam penyelesaian masalah (Gladwin, 1980). Pengambilan keputusan akan lebih dipahami apabila melihat bahwa pengambilan keputusan itu melewati suatu proses pengambilan keputusan. Erat terkait dengan proses pengambilan keputusan ini adalah situasi pengambilan keputusan (Matlin, 1998).

Situasi pengambilan keputusan adalah situasi atau kondisi dimana seseorang harus mempertimbangkan, berpikir, menaksir, memilih dan memprediksi sesuatu (Matlin, 1998). Pilihan atau alternatif yang dihadapi oleh setiap orang seringkali berlainan, demikian pula dalam hal akibat, risiko maupun

keuntungan dari pilihan yang diambilnya. Hal seperti ini jelas sekali pada gilirannya akan membuat situasi pengambilan keputusan antara individu yang satu dengan individu yang lain akan berbeda. Matlin (1998), pada penjelasan berikutnya, juga menyatakan bahwa situasi pengambilan keputusan yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi keberhasilan suatu pengambilan keputusan. Tahap berikutnya setelah seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan adalah tindakan untuk mempertimbangkan, menganalisa, melakukan prediksi, dan menjatuhkan pilihan terhadap alternatif yang ada. Dalam tahap ini reaksi individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Ada beberapa individu dapat segera menentukan sikap terhadap pertimbangan yang telah dilakukan, namun ada individu lain yang nampak mengalami kesulitan untuk menentukan sikap mereka. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap penentuan keberhasilan dari suatu proses pengambilan keputusan (Matlin, 1998).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa proses pengambilan keputusan itu diawali ketika seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan. Hal yang lain adalah bahwa situasi pengambilan keputusan antar individu bisa berlainan, karena pilihan atau alternatif yang dihadapi individu juga berlainan dan hal ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Penanganan yang tepat terhadap situasi pengambilan keputusan juga akan menentukan keberhasilan suatu proses pengambilan keputusan. Situasi pengambilan keputusan terjadi atau muncul dalam diri seseorang ketika ia diperhadapkan dengan permasalahan dan beberapa alternatif atau pilihan sebagai jawaban dari permasalahannya. Selanjutnya, dari beberapa alternatif jawaban

tersebut, ia mulai mempertimbangkan, berpikir, menaksir, memprediksi dan menentukan pilihan. Tahap menentukan pilihan terhadap alternatif yang ada merupakan tahap penting dalam proses pengambilan keputusan.

### **C. Gaya pengambilan Keputusan**

#### **1. Pengertian Gaya Pengambilan Keputusan**

Salah satu pengertian penting berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan ini, yaitu dalam aktifitas sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari proses pengambilan keputusan (Matlin, 1998). Pengertian penting lainnya yaitu berkaitan dengan keunikan atau keanekaragaman pengambilan keputusan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dalam hal mengambil keputusan, antar individu yang satu dengan individu yang lain melakukan pendekatan dengan cara yang tidak sama. Jadi ada gaya yang berbeda-beda antar individu yang satu dengan yang lain dalam melakukan pengambilan keputusan (Brigham Young University, 1999).

Gaya pengambilan keputusan dipahami sebagai cara respon yang dipelajari atau dibiasakan dimana melaluinya individu melakukan pendekatan dan melakukan pengambilan keputusan (Bruce & Scott, 1999). Batasan yang lain menyatakan bahwa gaya pengambilan keputusan adalah cara-cara unik yang dilakukan seseorang di dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya (Harren dalam Bruce & Scott, 1999). Dalam penjelasan berikutnya, Harren juga menyatakan bahwa tanpa memperhatikan keputusan-keputusan yang dibuatnya, tiap-tiap orang mempunyai cara unik untuk mengambil keputusan. Tidak ada satupun cara terbaik yang dapat berlaku bagi semua orang. Setiap orang

belajar mengandalkan suatu cara terbaik yang berlaku atas dirinya sesuai pengalamannya. Berdasarkan batasan-batasan tentang gaya pengambilan keputusan ini, maka diketahui bahwa gaya pengambilan keputusan ini bersifat individual, yaitu terkait dengan kondisi masing-masing individu. Hal ini jelas ikut menentukan gaya pengambilan keputusan yang dimiliki seseorang.

Harren, dkk (dalam Bruce & Scott, 1999) membedakan pengambilan keputusan ke dalam dua (2) gaya pengambilan keputusan yang berseberangan yaitu gaya rasional dan intuitif. Penggolongan dua gaya ini di dasarkan atas:

- a. Tingkat individu dalam menggunakan strategi pengambilan keputusan yang bersifat logis berlawanan dengan strategi pengambilan keputusan yang bersifat emosional.
- b. Cara individu dalam mengolah dan menanggapi informasi serta melakukan evaluasi dalam situasi pengambilan keputusan.

Pada penelitian selanjutnya Harren, dkk (dalam Bruce & Scott, 1999) menemukan bahwa ada dimensi ketiga yang muncul dalam gaya pengambilan keputusan, yaitu gaya pengambilan keputusan *dependen*, yaitu individu yang menghindari tugas pengambilan keputusan dan menyerahkan pada orang lain untuk mengambil keputusan. Namun dalam penelitian empiris yang dilakukan setelah penemuan tersebut, Harren kembali menunjukkan bahwa gaya pengambilan keputusan *dependen* ini bersifat *independen* atau terpisah dari gaya pengambilan keputusan rasional dan intuitif (dalam Bruce & Scott, 1999). Mengingat akan hal ini, maka dalam penelitian ini akan digunakan dua dimensi gaya pengambilan keputusan yang telah dikemukakan oleh Harren, dkk (dalam Bruce & Scott, 1999), yaitu gaya pengambilan keputusan rasional dan intuitif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal melakukan pengambilan keputusan, individu dapat digolongkan kepada salah satu gaya pengambilan keputusan. Setiap cara atau gaya pengambilan keputusan merupakan cara yang terbaik bagi masing-masing individu. Hal ini sekaligus memperlihatkan eksistensi gaya pengambilan keputusan sebagai keunikan individual. Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas mengenai masing-masing gaya pengambilan keputusan tersebut agar dapat dicapai pemahaman yang semakin baik.

## **2. Gaya Pengambilan Keputusan Rasional**

Harren, dkk (dalam Bruce & Scott, 1999) menyatakan bahwa gaya pengambilan keputusan rasional ini bercirikan adanya kepastian atau mengejar hal-hal yang eksak dan masuk akal, kemampuan yang tinggi dalam perencanaan, kepercayaan diri yang tinggi, cenderung menyelesaikan tugas dengan kontrol tinggi. Berdasarkan hal ini diketahui bahwa individu dengan gaya pengambilan keputusan rasional cenderung berusaha untuk merumuskan pengambilan keputusan dengan banyak menitikberatkan pada penalaran rasional. Hal-hal yang tidak masuk akal dan berkaitan dengan emosi, perasaan maupun fantasi tidak begitu dihiraukan, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan yang matang, perhitungan yang cermat, prediksi yang masuk akal dan pemikiran yang rasional tampak menonjol dalam diri individu dengan gaya pengambilan keputusan rasional ini. Mereka adalah tergolong orang yang tidak mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan Individu dengan gaya pengambilan keputusan rasional ini dapat menekan dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat emosional dalam proses pengambilan keputusan.

Bruce dan Scott (1999) menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah pengumpulan dan evaluasi informasi. Keen dalam disertasinya (dalam Bruce dan Scott, 1999), menunjukkan bahwa pengumpul informasi yang sistematis, terarah lebih memungkinkan menjadi evaluator informasi yang rasional, sementara itu pengumpul informasi yang lebih banyak melibatkan perasaan atau hal-hal yang bersifat emosional lebih memungkinkan menjadi evaluator informasi intuitif. Sekali lagi diketahui bahwa gaya pengambilan keputusan rasional menitikberatkan pada penalaran yang sistematis, terarah dan masuk akal.

Robbins (1996) menyatakan secara sosial gaya pengambilan keputusan yang rasional ini lebih banyak diterima dibanding yang lainnya, apalagi di masyarakat maju yang lebih banyak menaruh perhatian pada hal-hal yang rasional.

Mengacu pada uraian tersebut, penulis berkesimpulan seorang yang memiliki gaya pengambilan keputusan rasional cenderung mengarahkan dirinya pada hal-hal yang masuk akal dan menekan hal yang bersumber pada aspek emosional.

### **3. Gaya Pengambilan Keputusan Intuitif**

Gaya pengambilan keputusan intuitif ini lebih mengandalkan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan (Harren dkk dalam Bruce & Scott, 1999). Pengambilan keputusan intuitif menurut Robbins (1996) adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan, lebih tepatnya antara faktor emosional, fantasi dan

rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Robbins mengidentifikasi ada delapan kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu:

- a. Bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi
- b. Bila hanya ada sedikit *precedent* untuk diikuti
- c. Bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah
- d. Bila fakta-fakta yang terkait terbatas
- e. Bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti
- f. Bila data analisis kurang berguna
- g. Bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing
- h. Bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat

Dalam masyarakat maju seperti Amerika, Inggris dan beberapa negara maju lainnya yang sangat menjunjung tinggi analisa rasional, ternyata pengambilan keputusan intuitif ini masih banyak dilakukan, namun orang yang melakukan cenderung tidak mengakui bahwa mereka melakukan demikian. Hal ini karena gaya pengambilan keputusan rasional lebih diinginkan dan diterima dalam masyarakat. Berbeda dengan analisa rasional, orang yang melakukan pengambilan keputusan intuitif ini biasanya akan menemui kesulitan apabila ia diminta untuk menjelaskan bagaimana ia sampai pada kesimpulannya dalam pengambilan keputusan yang dibuatnya karena kesimpulannya lebih cenderung berdasar pada intuisi yang dimilikinya, sementara itu orang yang menggunakan pengambilan keputusan rasional akan dengan mudah menjelaskan bagaimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

jalan pikiran dan pertimbangan yang dipakai. Agar keputusan yang dibuat dapat dengan mudah diterima oleh banyak orang maka si pengambil keputusan intuitif sering mengemas keputusan yang dibuat itu dengan analisa yang bersifat rasional (Robbins, 1996).

Phillips, dkk (1984) melakukan penelitian tentang gaya pengambilan keputusan ini dan menemukan bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang ternyata terkandung kedua gaya pengambilan keputusan tersebut (rasional dan intuitif). Jadi dalam suatu pengambilan keputusan tidak secara mutlak atau sepenuhnya merupakan perwujudan salah satu gaya pengambilan keputusan saja. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Harren (dalam Bruce & Scott, 1999) yang menyimpulkan hal serupa, yaitu pendekatan keputusan yang dipakai individu mengandung unsur-unsur dari kedua gaya pengambilan keputusan. Penentuan gaya pengambilan keputusan yang dipakai seseorang ditentukan dari gaya mana yang mendominasi individu dalam melakukan pendekatan pengambilan keputusan. Jadi di antara kedua gaya pengambilan keputusan tersebut, tidak terdapat batasan yang tegas. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang individu sangat dimungkinkan mengandung ciri-ciri dari kedua gaya pengambilan keputusan tersebut. Hanya saja, penentuan gaya pengambilan keputusan yang dipakai oleh seseorang dilihat dari gaya pengambilan keputusan manakah yang muncul secara dominan dalam dirinya.

Berdasarkan penjelasan ini maka dapat ditarik beberapa hal berkaitan dengan gaya pengambilan keputusan intuitif. Pengambilan keputusan intuitif ini

sering diterapkan pada saat kondisi sulit diprediksikan, bila waktu yang tersedia terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan (kondisi seperti ini sering mengarahkan orang untuk lebih mengandalkan intuisinya). Pengambilan keputusan intuitif ini tidak berarti bersifat negatif atau lebih buruk daripada pengambilan keputusan rasional, hal ini terbukti dalam situasi yang genting gaya pengambilan keputusan intuitif ini ternyata sering dipergunakan orang.

Pemaparan mengenai kedua macam gaya pengambilan keputusan (rasional dan intuitif) seperti tersebut di atas bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperlihatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya. Secara teoritik pemaparan tersebut dapat dipandang sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan dapat ditemukan dua macam gaya pengambilan keputusan.

#### **D. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan**

Menarik sekali untuk mengetahui apakah yang dapat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan proses wajar yang dialami oleh individu. Dalam prakteknya ternyata ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Siagian (1991) menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adapun faktor internal tersebut antara lain:

##### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya

semakin luas pengetahuan seseorang semakin mempermudah pengambilan keputusan.

b. Aspek kepribadian

Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan.

Faktor eksternal dalam pengambilan keputusan, antara lain:

a. Kultur

Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu.

Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

b. Orang lain

Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain (terutama orang dekat) dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam mengambil keputusan.

Arroba (1998) menyatakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang, antara lain:

a. Informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi

b. Tingkat pendidikan

c. *Personality*

d. *Coping*, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan (proses adaptasi).

e. *Culture*

Sejalan dengan pembahasan utama dalam penelitian ini, yakni pengambilan keputusan dalam memilih kepala daerah, maka tanpa bermaksud menolak atau meniadakan faktor-faktor yang telah disebutkan di muka, penelitian ini akan secara khusus mengupas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih yang dikemukakan Anderson (1984), bahwa terdapat lima kategori yang dapat dijadikan kriteria dalam menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, yaitu *political values*, *organization values*, *personal values*, *policy values*, dan *ideological values*.

- a. *Political Values* (nilai-nilai politik). Dalam konteks ini keputusan diambil berdasarkan pada perhitungan keuntungan politis dimana kebijakan dipandang sebagai alat yang menguntungkan atau alat untuk mencapai tujuan kelompok kepentingannya. Melalui pandangan *political behavior* (kelakuan politis) keputusan yang dibuat akan diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan bagi, misalnya: organisasi buruh, aliansi petani, kelompok pergerakan pemuda, atau partai politik. Terkait dengan pemilihan Kepala Daerah, bagi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia politik, faktor nilai-nilai politik mungkin dapat dijadikan salah satu faktor yang penting dalam memilih kriteria pemimpin Kepala Daerah. Artinya jika masyarakat memandang bahwa dirinya mendapatkan keuntungan dalam hal nilai-nilai politik, maka mereka memutuskan milih pemimpin yang mampu memperjuangkan tujuan diri dan kelompoknya.
- b. *Organization Values* (nilai-nilai organisasional). Pembuatan keputusan, khususnya birokrat, dapat juga dipegaruhi oleh nilai organisasional.

Organisasi, seperti pemerintah, menggunakan banyak mekanisme *stick and carrot* dalam upaya untuk membujuk pegawainya agar dapat menerima dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan organisasi. Selanjutnya, keputusan individu diarahkan melalui pertimbangan seperti keinginan untuk organisasinya tetap hidup, untuk meningkatkan atau memperluas program dan aktivitasnya, atau untuk menjaga kekuasaan serta hak-hak istimewanya. Contoh: pegawai negeri sipil (PNS), Dharma Wanita, himpunan suku tertentu, dan sebagainya. Faktor nilai-nilai organisasi ini dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, terlihat hanya dapat diberlakukan pada kelompok-kelompok tertentu saja, yang terikat dengan instansi atau perhimpunan tertentu. Masyarakat akan memilih seorang calon kepala daerah yang memiliki kesamaan keanggotaan dengan dirinya. Hal ini bertujuan agar organisasi atau perhimpunan yang dimasukinya dapat bertahan sampai masa kepemimpinan kepala daerah yang dipilihnya berakhir.

- c. *Personal Values* (nilai-nilai pribadi). Seperti diketahui, tidak ada manusia yang identik (sama persis) dengan manusia lainnya, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam konteks ini maka *personal values* menjadi logika berfikir yang juga perlu diperhatikan dalam memahami pengambilan keputusan. Misalnya, urgensi untuk melindungi atau mempromosikan keadaan fisik atau keuangan seseorang yang baik, reputasi, atau posisi historis seseorang dapat dijadikan sebagai kriteria keputusan. Seperti memilih seorang calon legislatif karena pertimbangan akan diberikan uang terima kasih atau memilih untuk tidak memilih (golput) karena ingin dianggap idealis. Faktor nilai-nilai pribadi ini pada dasarnya tersamakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalam setiap kali dilakukan pemilihan kepala daerah maupun pemilu secara umum. Seperti dinyatakan pada uraian sebelumnya bahwa nilai-nilai pribadi yang dianut oleh seseorang, biasanya berbeda dengan orang lain. Terdapat pemikiran dan pandangan yang unik dari masing-masing individu dalam mengambil keputusan memilih seorang pemimpin. Masyarakat yang memilih berdasarkan nilai-nilai pribadi ini biasanya telah melakukan evaluasi terhadap calon pemimpin lainnya, kemudian melakukan penilaian baik mengenai kelebihan maupun kekurangan dari calon pemimpin.

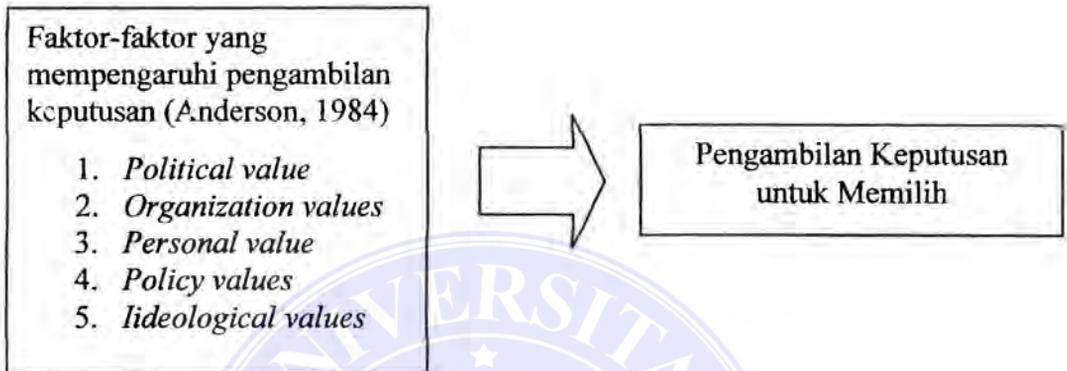
- d. *Policy Values* (nilai-nilai kebijakan publik). Pembuatan keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas. Sekelompok mahasiswa menyuarakan sebuah perubahan atau penentangan terhadap sebuah kebijakan karena mereka percaya tindakannya secara moral benar meskipun dapat membawa resiko pada mereka. Faktor ini identik dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin. Jika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap seorang calon pemimpin, maka faktor ini akan terlihat dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Mengutamakan faktor nilai-nilai kebijakan publik ini berdampak pada rasa kecewa yang sangat besar apabila pemimpin yang mereka pilih tidak memenuhi janji seperti kampanye yang digelar pada saat sebelumnya yakni masa-masa kampanye.
- e. *Ideological Values* (nilai-nilai ideologis). Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran sederhana mengenai dunia dan cara bertindak sebagai petunjuk bagi

seseorang untuk berperilaku. Di banyak negara berkembang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, nasionalisme, merupakan nilai-nilai ideologis yang menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan dalam dan luar negeri. Misalnya seseorang memilih partai karena partai tersebut memperjuangkan syari'at Islam atau peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Faktor ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang benar-benar peduli atau menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap suatu kondisi. Masyarakat berharap dengan terpilihnya seorang pemimpin sesuai harapan mereka, maka pemimpin akan dapat merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diprogramnya sehingga mendatangkan kepuasan bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa batasan atau pengertian tentang pengambilan keputusan yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diberikan beberapa pokok atau *point* penting berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Pertama, bahwa pengambilan keputusan seringkali berkaitan dengan munculnya permasalahan. Individu yang satu dengan individu yang lain tentu saja memiliki permasalahan yang berlainan, hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi beragam antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kedua, sebelum suatu keputusan diambil, seseorang akan menghadapi apa yang disebut oleh Matlin (1998) sebagai situasi pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini individu melakukan pertimbangan, berpikir, menaksir, memprediksi dan melakukan pemilihan terhadap sejumlah alternatif yang ada. Ketiga, pengambilan keputusan tidak hanya meliputi proses kognisi dan afeksi saja, melainkan juga meliputi perilaku seseorang. Pengambilan keputusan yang diambil oleh seseorang akan mengontrol tindakannya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan perilaku seseorang termasuk produk dari keputusan yang diambil. Keempat, proses

pengambilan keputusan ternyata juga dipengaruhi oleh aspek kepribadian seseorang.

### E. Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini hanya mengukur dan menafsirkan hasilnya, oleh karena itu desain yang sesuai untuk penelitian ini adalah berdasarkan fakta yang didapat dari penelitian ini dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yakni menggambarkan kondisi yang ada sesuai data yang diperoleh di lapangan.

#### **B. Identifikasi Variabel Penelitian**

Dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka dipandang perlu kiranya untuk mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang menjadi penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin (Bupati).

#### **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi operasional variabel penelitian dimaksudkan agar pengukuran variabel penelitian lebih terarah sesuai dengan metode pengukuran yang dipersiapkan. Adapun definisi operasional dari variabel penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pengambilan keputusan dalam memilih Bupati adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang dalam memilih seorang Bupati berdasarkan berbagai pertimbangan yang dianut oleh orang tersebut. Data mengenai pengambilan keputusan dalam memilih ini diungkap dengan

menggunakan skala yang disusun berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Anderson (1984), yaitu *political values*, *organization values*, *personal values*, *policy values*, dan *ideological values*.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah objek atau kejadian yang diselidiki yang terdiri dari semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel penelitian itu hendak digeneralisasikan (Hadi, 1986). Populasi dalam penelitian ini adalah para pemilih tetap yang telah didata oleh Biro Pusat Statistik daerah Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah ± 330.000 Jiwa. Sementara itu untuk Kota Panyabungan sendiri jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tahun 2013 ada sebanyak ± 56.000 orang.

Mengingat jumlah populasi yang sangat banyak, maka peneliti berencana mengambil sebagian dari populasi dan ini dikenal dengan istilah sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikanto (2006) yang mengatakan bahwa sebagai ancer-ancer, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.

Sampel penelitian diambil berdasarkan jumlah pemilih tetap yang sudah didata oleh Biro Pusat Statistik daerah Mandailing Natal pada tahun 2013. Mengacu pada jumlah populasi yang sangat banyak, peneliti mengambil sebagian kecil dari jumlah populasi dengan menggunakan berbagai pertimbangan.

Perlu dipahami bahwa besarnya sampel tidak tergantung pada besar/ukuran populasi ([ocw.usu.ac.id/course/.../10\\_11\\_teknik\\_penarikan\\_sampel\\_full.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/.../10_11_teknik_penarikan_sampel_full.pdf)). Sebagai contoh mengambil sampel 500 orang mahasiswa UGM yang jumlahnya 36.000 mahasiswa sama tingkat teliti dan akuratnya dengan sampel 500 orang dari seluruh penduduk Yogya yang jumlahnya 3,2 juta jiwa. Ketelitian kedua sampel tersebut sama yakni menggunakan sampel 500 orang, dan membandingkan penduduk Yogya yang berjumlah 3,2 juta jiwa dan mahasiswa UGM berjumlah 36.000 tidaklah relevan. Karena tingkat ketelitian sebuah sampel diukur dari besar sampel dan bukan besar populasi. Dengan perkataan lain, populasi pada sebuah kota, sebuah daerah, sebuah propinsi mempunyai ukuran yang sama dan diperlakukan sama dalam sampling. Ukuran dari suatu populasi tidak mempunyai hubungan dengan besar sampel, barangkali suatu hal yang susah dimengerti. Untuk mengilustrasikan hal ini dapat digambarkan demikian. Misalnya mempunyai sekotak kelereng, lalu kita ambil dari kotak itu sebuah kelereng yang berwarna biru. Kita akan membuat kesalahan apabila menarik kesimpulan bahwa semua kelereng dalam kotak itu berwarna biru. Jika kita mengambil segenggam kelereng sejumlah 10 butir kelereng, yang terdiri atas empat biru dan enam merah, kita akan lebih teliti dalam menebak bahwa kotak itu berisi lebih banyak kelereng berwarna merah daripada kelereng berwarna biru. Apabila kita menggunakan kedua genggam tangan secara bersamaan dan kita mendapatkan 75 kelereng berwarna merah dan 25 kelereng berwarna biru, kita dapat lebih khusus lagi berkata bahwa kotak itu berisi 3 kelereng merah untuk setiap kelereng biru. Dengan kata lain, tidaklah penting kita

mengambil kelereng dari kotak kecil atau besar, yang membuat estimasi warna kelereng jauh lebih teliti/presisi adalah ukuran tangan (besar sampel) dan tidak bergantung pada ukuran kotak dan banyaknya kelereng (ukuran populasi). Tetapi dengan asumsi bahwa kelereng dalam kotak itu bercampur dengan baik dan tangan itu merupakan sampel acak yang benar.

Berdasarkan contoh di atas, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, yaitu dengan memilih sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya (Hadi,1989). Adapun ciri-ciri atau sifat-sifat dari subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pemilih tetap yang telah didata oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di Kota Panyabungan.
2. Tidak menjadi anggota dari salah satu Partai Politik
3. Berusia 25 sampai 50 tahun.
4. Berpendidikan minimal SMA

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria ada sebanyak 2000 orang. Sebagai akibat dari ketidakmampuan meneliti seluruh sampel, maka akan digunakan 600 orang sebagai sampel.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala pengambilan keputusan dalam

memilih pemimpin. Menurut Hadi (1986) bahwa skala merupakan metode



penyelidikan yang berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi atau diri sendiri.

Ada beberapa anggapan sehingga digunakan skala sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hadi (1986) yaitu:

1. Subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Hal-hal yang sudah dinyatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Interpretasi subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin yang dikemukakan oleh Anderson (1984) yaitu *political values, organization values, personal values, policy values, dan ideological values*.

Tipe skala yang digunakan adalah tipe skala tertutup dan langsung yaitu skala yang disampaikan kepada orang yang diminta informasi tentang dirinya sendiri (Kartono, 1990). Bentuk skala yang digunakan adalah bentuk skala Likert. Pernyataan yang terdapat dalam skala ini disusun dalam bentuk *favourable* atau mendukung isi pernyataan dan *unfavourable* atau tidak mendukung isi pernyataan. Penelitian untuk item yang *favourable* adalah nilai 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS), nilai 3 untuk jawaban Setuju (S), nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Sementara untuk item yang *unfavourable* nilai 1 untuk jawaban Sangat Setuju (SS), nilai 2 untuk jawaban

Setuju (S), nilai 3 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), nilai 4 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS).

## F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

### 1. Validitas Alat Ukur

Validitas berasal dari kata “*validity*” yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan (mampu mengukur apa yang hendak diukur) dan kecermatan suatu instrumen pengukuran melakukan fungsi ukurnya, yaitu dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya antara subjek yang lain (Azwar, 1997). Sebuah alat ukur dapat dinyatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dikenakannya alat ukur tersebut. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur (skala) adalah teknik korelasi *product moment* dari Karl Pearson, dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{\Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \left( \Sigma X^2 \right) - \frac{(\Sigma X)^2}{N} \right\} \left\{ \left( \Sigma Y^2 \right) - \frac{(\Sigma Y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan:

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel x (skor subjek tiap item) dengan variabel y (total skor subjek dari keseluruhan item).
- $\Sigma XY$  = Jumlah hasil perkalian antara variabel x dan y
- $\Sigma X$  = Jumlah skor keseluruhan subjek setiap item
- $\Sigma Y$  = Jumlah skor keseluruhan item pada subjek
- $\Sigma X^2$  = Jumlah kuadrat skor x
- $\Sigma Y^2$  = Jumlah kuadrat skor y
- $N$  = Jumlah subjek

Nilai validitas setiap butir (koefisien *r product moment* Pearson) sebenarnya masih perlu dikoreksi karena kelebihan bobot. Kelebihan bobot ini terjadi karena skor butir yang dikorelasikan dengan skor total, ikut sebagai komponen skor total, dan hal ini menyebabkan koefisien *r* menjadi lebih besar (Hadi, 1996). Dalam upaya membersihkan kelebihan bobot ini dipakai rumus *part whole*.

$$r_{bt} = \frac{(r_{xy})(SD_y) - (SD_x)}{\sqrt{\{(SD_x)^2 + (SD_y) - 2(r_{xy})(SD_x)(SD_y)\}}}$$

Keterangan:

- rbt = Koefisien korelasi setelah dikoreksi dengan *part whole*  
 rxy = Koefisien korelasi sebelum dikoreksi  
 SDy = Standar deviasi total  
 SDx = Standar deviasi butir

### b. Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas alat ukur adalah untuk mencari dan mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Reliabel dapat juga dikatakan kepercayaan, keterasalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama selama dalam diri subjek yang diukur memang belum berubah (Azwar, 1997). Skala yang akan diestimasi reliabilitasnya dalam jumlah yang sama banyak. Untuk mengetahui realibilitas alat ukur maka digunakan rumus Alpha sebagai berikut:

$$\alpha = 2 \left[ \frac{1 - S1^2 = S2^2}{Sx^2} \right]$$

Keterangan:

- S1<sup>2</sup> dan S2<sup>2</sup> = Varians skor belahan 1 dan Varians skor belahan 2

$Sx^2$  = Varians skor skala

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk melihat frekuensi dan persentase. Adapun rumus yang digunakan adalah F persen. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini tidak untuk membuktikan hipotesis, melainkan hanya memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin.

Melalui metode ini nantinya akan dapat diketahui jumlah jawaban untuk masing-masing nilai pada setiap faktor, setelah diketahui kemudian dijumlahkan sebagai skor total faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin. Rumus yang dipakai dalam menghitung persentase jawaban adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Setiap Faktor}}{\text{Total Jawaban Setiap Fakt.}} \times 100\%$$

Kemudian untuk menghitung jumlah frekuensi subjek yang memberikan jawaban untuk setiap faktor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Frekuensi} = \frac{\text{Persentase}}{100} \times N$$



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 6592 kali jawaban 3 (setuju) yaitu sebanyak 169 orang dan 6896 kali muncul, jawaban 2 (tidak setuju), sebanyak 177 orang. Sementara jawaban 4 (sangat setuju) 2328 kali muncul, sebanyak 60 orang dan 2553 kali muncul jawaban 1 (sangat tidak setuju) sebanyak 65 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelima faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan memilih pemimpin, berimbang antara yang menyatakan setuju dengan yang tidak setuju.
2. Pada subjek penelitian laki-laki yang berjumlah 326 orang, terdapat 3 faktor yang mereka setujui, yaitu faktor *personal values*, *policy values* dan faktor *ideological values*. Dua faktor lagi yang mereka tidak setujui adalah faktor *political values* dan faktor *organization values*.
3. Pada subjek penelitian perempuan yang berjumlah 145 orang, terdapat 3 faktor yang mereka setujui, yaitu *personal values*, *policy values* dan *ideological values*. Sementara faktor yang tidak mereka setujui adalah faktor *political values* dan faktor *organization values*.
4. Pada subjek penelitian yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari 143 orang, diketahui terdapat 3 faktor yang mereka setujui, yaitu faktor *personal values*, *policy values* dan faktor *ideological values*.

Sedangkan yang tidak mereka setuju adalah faktor *political values* dan faktor *organization values*.

5. Selanjutnya hasil penelitian dari subjek penelitian yang bekerja tidak sebagai PNS, diketahui terdapat 3 faktor juga yang mereka setuju, yaitu faktor *personal values*, faktor *policy values* dan faktor *ideological values*.

Sedangkan yang tidak mereka setuju adalah faktor *political values* dan faktor *organization values*.

## B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut ini dapat diberikan beberapa saran, antara lain:

### 1. Kepada Subjek Penelitian

Melihat data yang telah didapatkan serta fakta yang terjadi di lapangan, maka kepada subjek penelitian disarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih. Pilihlah pemimpin yang menurut anda pantas menjadi pemimpin. Disarankan agar jangan melakukan pemilihan berdasarkan ajakan orang lain atau pengaruh hal-hal tertentu yang pada akhirnya mendatangkan kekecewaan karena salah memilih. Artinya akibat kesalahan dalam memilih, hak-hak politik masyarakat tidak terpenuhi. Kondisi ini biasanya menggambarkan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan.

### 2. Kepada Calon Pemimpin

Disarankan agar mampu mengemban amanat rakyat, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan golongan. Menjadi wakil rakyat yang sebenar-benarnya. Masyarakat sudah sering kecewa dengan

kinerja pemimpin, oleh sebab itu utamakan rasa peduli terhadap rakyat dan menjadikan jabatan Bupati sebagai abdi masyarakat, bukan sebagai penguasa.

### 3. Kepada Peneliti Berikutnya

Menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya, baik itu mahasiswa maupun profesional lain yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor lain yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memilih, diantaranya adalah faktor pendidikan dan etnis. Selain itu kepada peneliti berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini agar mengarahkan penelitian secara jelas kepada objek yang dipersepsikan. Kemudian disarankan untuk menambah teori yang relevan dengan variabel penelitian ini. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian lanjutan, dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisubroto, D. 1987. Orientasi nilai orang Jawa dan ciri-ciri kepribadiannya. *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: UGM.
- Anderson, S.M., & Klatzky, R.L. 1984. Trait and social stereotypes : level of categorization. *Journal of Personality and Social Psychology*. 53, 235-246.
- Arroba, T. 1998. Decision making by Chinese – US. *Journal of Social Psychology*. 38, 102 – 116.
- Atkinson, R.L., Atkinson, R.C. & Hilgard, E.R. 1996. *Pengantar Psikologi Jilid 2*. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Azwar, S..1998. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Barlett, P.F. 1980. Cost Benefit Analysis : A Test of Alternative Methodologies, dalam Peggy F. Barlett (Ed.), *Agricultural Decision Making: Anthropological Contributions to Rural Development*. New York : Academic Press Inc. Hal. 148 – 154.
- Birgham Young University. 1999. *Career and Major : Decision Making*. Utah : BirghamUniversity.[http://www.byu.edu/cc/career\\_planning/assistance/decision.htm](http://www.byu.edu/cc/career_planning/assistance/decision.htm).
- Bischof, L.J. 1970. *Interpreting Personality Theories*. New York : Harper and Row Publishers.
- Bruce, R.A. ; Scott, S.G. 1999. *The Moderating Effect of Decision Making Style on The Turnover Process : An Extention of Previous Research*.  
<http://www.cbpa.louisville.edu/bruce/research/japum.htm>.
- Carver, C.S. & Scheier, M. F. 1996. *Perspective on Personality*. 3rd.ed. Chicago: Allyn and Bacon.
- Chang, K. 1972. *Decision Making System for Family Planning Program*. Minnesota: Population Centre.
- Christin. 2001. Kemampuan Wanita dalam Menikmati Keakraban Suami-Istri ditinjau dari Skema Kepribadian dan Strategi Menghadapi Masalah. *Tesis*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta : Fakultas Psikologi, UGM.
- Dunnette, M. 1976. *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*. Chicago : Rand Mc. Nally College Publishing Company.